

**KEBIJAKAN IMIGRASI AUSTRALIA DI BAWAH PEMERINTAHAN
PM JOHN HOWARD
(KASUS IMIGRAN GELAP DI KAPAL TAMPA 2001)**

SKRIPSI



PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SUABAYA

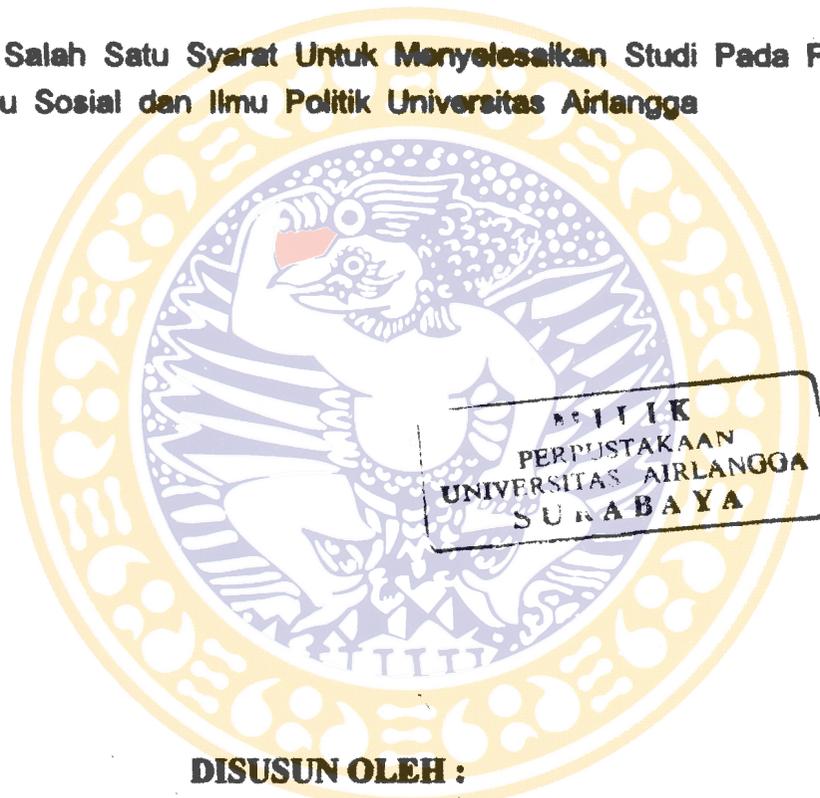
DISUSUN OLEH :
NI MADE KADE WIDIARINI
Nim : 079815665

**Prodi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga
Surabaya
2002**

**KEBIJAKAN IMIGRASI AUSTRALIA DI BAWAH PEMERINTAHAN
PM JOHN HOWARD
(KASUS IMIGRAN GELAP DI KAPAL TAMPA 2001)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga



PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

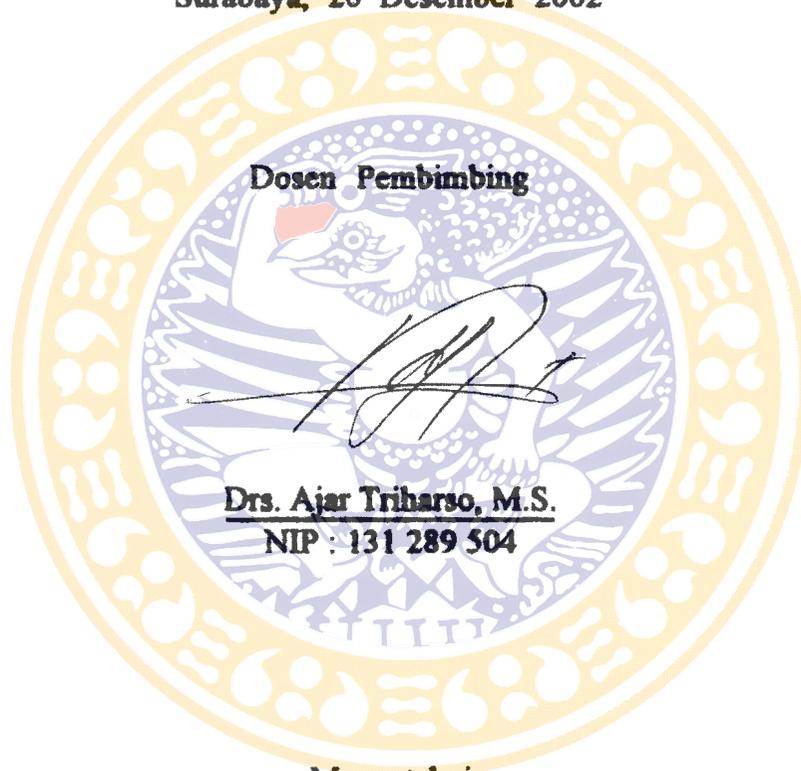
DISUSUN OLEH :
NI MADE KADE WIDIARINI
Nim : 079815665

**Prodi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga
Surabaya
2002**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 20 Desember 2002



Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

[Handwritten Signature]

Dra. Lilik Salamah, M.Si.
NIP : 131 569 360

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji
Pada Tanggal 8 Januari 2003

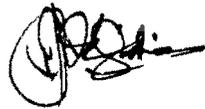
Komisi Penguji terdiri dari

Ketua



Dra. Sartika Susilowati, M.A.
NIP : 132 134 681

Anggota



Drs. T. Soedjadin, M.A.
NIP : 130 368 697



M. Muttaqien, S.I.P.
NIP : 132 230 968

Abstrak

Australia selama ini dikenal sebagai negara yang menjadi tujuan utama dari para imigran yang berusaha mencari kehidupan yang lebih baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Terbukanya pintu imigrasi Australia memberikan kesempatan yang lebih besar untuk siapa saja yang berkeinginan berimigrasi ke Australia, asalkan dapat memenuhi persyaratan keimigrasian yang telah ditetapkan pemerintah. Pertimbangan ekonomi sosial dan kemanusiaan masih terus menjadi dasar bagi pemerintah Australia dalam menerapkan kebijakan imigrasinya. Disamping itu, kebijakan juga dimaksudkan untuk menerima orang-orang yang secara ekonomi memiliki keahlian-keahlian khusus. Dengan kata lain, melalui kebijakan imigrasi tersebut Australia dapat mengontrol arus masuknya migrasi ke dalam wilayah Australia. Namun dampak negatif yang muncul dari usaha pengontrolan migrasi itu adalah munculnya fenomena migrasi ilegal. Meski Australia telah melakukan pengawasan yang tinggi terhadap para pendatang asing yang masuk dan menetap di negaranya, namun tetap saja kehadiran mereka secara ilegal tidak dapat dihindari. Bahkan fenomena migrasi ilegal ke Australia ini bukanlah sesuatu yang baru.

Beragam cara yang dilakukan para imigran yang masuk secara ilegal ke Australia, baik itu melalui pesawat terbang maupun kapal laut. Kasus imigran gelap yang datang ke Australia, khususnya yang datang dengan kapal laut seringkali menarik perhatian media massa. Kasus penolakan yang dilakukan pemerintah Australia dibawah kepemimpinan PM John Howard terhadap para imigran gelap yang ditampung di atas kapal Tampa juga sangat menarik perhatian yang luas. Tidak hanya menarik perhatian masyarakat Australia sendiri tetapi juga masyarakat internasional. Hal ini karena keputusan penolakan yang dilakukan oleh pemerintah Australia ini merupakan yang pertama kali dalam menghadapi kasus imigran gelap yang jumlahnya semakin meningkat di negaranya.

Masalah penelitian yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengapa pemerintah Australia mengambil sikap untuk menolak masuk kedatangan para imigran yang ditampung di atas kapal Tampa tersebut serta bagaimana kebijakan Australia dalam menghadapi peningkatan jumlah imigran ilegal yang masuk ke wilayahnya. Dalam upaya mencari jawaban atas permasalahan tersebut, Penulis mengolah data-data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, baik buku, internet, majalah, dll. Analisa terhadap permasalahan ini dilakukan dengan bantuan teori mengenai teori pembuatan keputusan, teori image, konsep kepentingan nasional, konsep migrasi, dan doktrin kedaulatan negara.

Sebagai langkah awal untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian, Penulis menguraikan permasalahan imigran gelap yang dihadapi Australia khususnya yang dihadapi oleh pemerintahan PM John Howard. Pada bab berikutnya akan diuraikan kebijakan imigrasi Australia menghadapi permasalahan imigran gelap di bawah pemerintahan PM John Howard. Selanjutnya pada bab IV akan dijelaskan oleh Penulis kebijakan yang diambil Australia dalam menghadapi kasus kapal Tampa. Dalam bab V, yang juga merupakan bagian akhir dari skripsi ini, Penulis mencantumkan rangkuman singkat dari bab-bab sebelumnya, jawaban atas pertanyaan penelitian, serta pembuktian dari hipotesis yang telah dirumuskan pada bab I.

Kata kunci : imigran gelap, pengungsi, pencari suaka